BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Marga Petajin Ulu termasuk dalam wilayah administrasi Tebo. Sistem pemerintahan adat ditetapkan oleh Belanda selama periode kolonial lewat Pasal 131 Ayat 8 *Indische Staatsregeling* (IS), yang mengatur pemerintahan hingga ke desa. sesuai dengan *Indische Gemonte Ordonentice Buitengewesten* (IGOB), yang diterbitkan pada tanggal 3 September 1938 (Stbl. No. 490), yang berfungsi sebagai Peraturan Negeri Otonom di luar Jawa dan Madura. Pasal 1 menetapkan susunan negeri, hak-hak negeri, badan pengurus negeri, dan alat negeri lain, kecuali seperti yang disebutkan dalam pasal 8 yang akan diatur sesuai dengan hukum Marga (Adatrecht).

Marga Petajin Ulu hidup di tujuh dusun yang dipimpin oleh satu orang. Bersama dengan nenek mamak, kepala dusun (Rio) memerintah yang menjadi bagian dari kerapatan dusun. Kerapatan dusun hanya bertanggung jawab atas fungsi eksekutif. Kepala dusun dibantu oleh mangku, yang berfungsi sebagai kepala kampung, dan perangkat syarak setingkat dusun.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, desa atau marga disebutkan sedikit. Setelah Undang-Undang No 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah dibuat, undang-undang ini dianggap terlalu sederhana. "Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga

tingkatan, ialah Provinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil), marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri", menurut ayat satu dari Pasal 1. Menurut Pasal 18, Ayat 3, kepala daerah desa dipilih oleh kepala daerah provinsi dari kelompok yang terdiri dari minimal dua calon dan maksimal empat calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah desa. Selain itu, undang-undang ini menetapkan struktur.